

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Desember 2022/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SURADJI JUNUS**
2. Jabatan : **WAKIL WALIKOTA**
3. NHK : **182407**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**Rp. **6.129.000.000**

1. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 502.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000
3. Tanah Seluas 2240 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 695.000.000
4. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m2/175 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.228.000.000
6. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , WARISAN Rp. 247.000.000
7. Tanah Seluas 4200 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 855.000.000
8. Tanah Seluas 3540 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , WARISAN Rp. 725.000.000
9. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 595.000.000
10. Tanah Seluas 7000 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 152.000.000
11. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
12. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL



SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 195.000.0001. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
195.000.000**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 97.545.059**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 384.483.853**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 6.806.028.912**III. HUTANG** Rp. 38.020.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 6.768.008.912

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.